

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan luar negeri Jepang, yang digunakan untuk mencapai berbagai kepentingan nasional seperti stabilitas kawasan, promosi perdamaian, dan penguatan posisi internasional. Sejak diperkenalkannya *Official Development Assistance* (ODA) pada tahun 1954, Jepang telah mengalami transformasi dari sekadar negara penerima menjadi salah satu pendonor terbesar di dunia. Transformasi tersebut tidak hanya terjadi pada skala geografis, tetapi juga pada pendekatan strategis yang digunakan, termasuk melalui kerja sama multilateral. Salah satu inisiatif penting yang mencerminkan hal ini adalah *Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development* (CEAPAD), yang diluncurkan pada tahun 2013 di tengah meningkatnya perhatian Jepang terhadap konflik Palestina dan Israel. Jepang memandang bahwa perdamaian dan pembangunan di Palestina merupakan kunci untuk stabilitas Timur Tengah yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kepentingan ekonomi dan geopolitik Jepang, termasuk keamanan energi dan posisi Jepang dalam tatanan global.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang menginisiasi CEAPAD sebagai instrumen kerjasama bantuan ke Palestina disebabkan oleh upaya Jepang untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin regional, mediator, dan developer dalam konflik Palestina dan Israel. Peran yang dilakukan oleh Jepang didorong oleh *ego's role conception* dan *alter's prescription* berdasarkan teori peran Holsti. Faktor *ego's role conception* yang pertama adalah kerangka utama kebijakan luar negeri Jepang selama masa pemerintahan Shinzo Abe. Berdasarkan identitasnya sebagai negara non-militer yang menjunjung tinggi nilai-nilai damai, Jepang mendefinisikan perannya di CEAPAD sebagai pemimpin regional di Asia Timur, mediator yang mendukung perdamaian, serta developer yang memberikan bantuan pembangunan teknis dan ekonomi kepada Palestina.

Faktor kedua adalah kompetisi Jepang dengan Tiongkok. Dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok sebagai pesaing strategis utama di kawasan dan global. Meskipun pada CEAPAD I Tiongkok tidak diikutsertakan, namun pada tahun 2016 Tiongkok bergabung dalam pertemuan CEAPAD, yang menunjukkan adanya dinamika baru dalam konfigurasi kekuatan regional. Kehadiran Tiongkok ini mendorong Jepang untuk mempertahankan kepemimpinannya dengan memposisikan diri sebagai penggagas, koordinator, dan fasilitator utama dalam CEAPAD. Inisiatif ini menjadi simbol eksistensi Jepang di luar skema dominasi Tiongkok, sekaligus memperkuat koalisi negara-negara Asia Timur yang sejalan dengan nilai-nilai pembangunan damai. Dengan demikian, CEAPAD tidak hanya mencerminkan kontribusi Jepang terhadap perdamaian di Timur Tengah, tetapi juga merupakan ekspresi dari persaingan kepemimpinan regional di antara dua kekuatan besar Asia yang menggunakan kerja sama pembangunan sebagai alat diplomasi.

Di sisi lain faktor *alter's prescription* yang pertama dari dibentuknya oleh Jepang adalah aliansi Jepang dengan Amerika Serikat. Aliansi antara Jepang dan Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam membentuk orientasi kebijakan luar negeri Jepang, khususnya dalam konteks keterlibatannya terhadap isu Palestina melalui forum CEAPAD. Aliansi ini menciptakan batasan sekaligus peluang strategis bagi Jepang. Di satu sisi, Jepang terikat pada kebijakan keamanan yang bergantung pada perlindungan militer Amerika Serikat, sehingga tidak dapat mengambil langkah agresif atau militeristik dalam konflik internasional seperti isu Palestina–Israel. Hal ini mendorong Jepang untuk lebih menonjolkan peran non-militer, seperti diplomasi ekonomi dan bantuan pembangunan, sebagai kontribusi alternatif dalam menciptakan stabilitas kawasan. Oleh karena itu, CEAPAD dibentuk oleh Jepang dengan memberikan dukungan secara *low politics* yang bertujuan untuk menjaga hubungan dengan Amerika Serikat namun tetap menjalankan tujuan Jepang untuk berperan sebagai mediator dalam konflik Israel dan Palestina.

Faktor kedua adalah kebijakan Jepang berpusat pada aktivitas PBB. Keanggotaan Jepang di PBB memberikan landasan kuat bagi Jepang untuk memainkan peran aktif dalam isu Palestina melalui pendekatan non-militer. Jepang secara konsisten merujuk pada prinsip-prinsip dan resolusi PBB sebagai legitimasi atas kebijakan luar negerinya, termasuk dalam merancang dan mengimplementasikan CEAPAD. Forum CEAPAD sendiri merupakan manifestasi konkret dari komitmen Jepang terhadap nilai-nilai PBB, terutama dalam mendukung pembangunan, stabilitas, dan perdamaian di wilayah konflik. Melalui CEAPAD, Jepang tidak hanya menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara yang sejalan dengan resolusi PBB, tetapi juga memperluas ruang kontribusinya sebagai developer dan aktor diplomatik yang proaktif. Dengan demikian, peran Jepang di PBB dan inisiatif CEAPAD saling melengkapi dalam membentuk citra Jepang sebagai negara damai yang berpengaruh dalam sistem internasional. Dengan demikian, CEAPAD menjadi bukti nyata bagaimana Jepang memadukan aspirasi internal dan tekanan eksternal dalam satu kerangka strategis, yang memperlihatkan evolusi peran Jepang sebagai negara yang tidak hanya oportunistik dan teknis, tetapi juga berpengaruh secara diplomatik dan normatif dalam sistem internasional.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis mengenai peran Jepang dalam kerjasama bantuan ke Palestina melalui CEAPAD dengan menggunakan teori peran Holsti, berikut saran peneliti yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya.

6.2.1 Saran Praktis

Penelitian ini menemukan bahwa bantuan yang Jepang berikan melalui CEAPAD belum optimal dikarenakan oleh sejumlah faktor. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk memperluas fokus kerjasama ke sektor yang lebih adaptif terhadap krisis dan memperkuat mekanisme program serta melibatkan aktor lokal Palestina guna meningkatkan relevansi dan menjamin keberlanjutan

bantuan yang berdampak.

6.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini berfokus kepada peran-peran yang mendorong Jepang untuk menginisiasi CEAPAD pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe menggunakan teori peran Holsti. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya yang ingin membahas topik serupa dapat menggunakan teori atau konsep yang dapat memberikan sudut pandang baru seperti konstruktivisme untuk menjelaskan dimensi identitas dan norma atau dapat dilakukan penelitian komparatif antara CEAPAD dan inisiatif serupa dari negara lain yang akan memperkaya pemahaman tentang strategi bantuan luar negeri dalam konteks persaingan regional.